



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENDIDIKAN



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
DINAS PENDIDIKAN
KOTA BATAM
TAHUN 2021**

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Tahun 2021 dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban Kepala Dinas Pendidikan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam membantu Walikota Batam menyelenggarakan pemerintahan di bidang pendidikan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pendidikan Kota Batam.

Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan kepada Dinas Pendidikan Kota Batam dalam mengelola pendidikan berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2016 – 2021.

Kami sadar bahwa Laporan Kinerja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran senantiasa kami harapkan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di tahun mendatang. Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini bermanfaat bagi Dinas Pendidikan Kota Batam dan dapat dijadikan landasan bagi kesinambungan/kebijakan program dalam pembangunan Pendidikan Selanjutnya.

Batam, Januari 2022
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Batam



HENDRI ARULAN, S.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19670719 199103 1 009



Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Ringkasan Eksekutif	iv
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas pokok dan fungsi	2
1.3 Struktur Organisasi	3
1.4 Visi dan Misi	7
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	8
2.1 Perencanaan	8
2.2 Rencana Strategis	9
2.3 Perjanjian Kinerja	10
BAB III Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan	15
3.1 Capaian Kinerja Dinas Pendidikan	17
3.2 Analisis Capaian Kinerja	19
3.3 Realisasi Anggaran	33
3.4 Akuntabilitas Kinerja Keuangan	34
BAB IV Penutup	40
4.1 Tinjauan Umum	40
4.2 Tinjauan Khusus	41
4.3 Saran dan Tindak Lanjut	41



Daftar Tabel

Tabel 1.1.	Jumlah Sekolah di Kota Batam	4
Tabel 1.2.	Jumlah PNS Berdasarkan Golongan dan Non PNS	4
Tabel 1.3.	Tingkat Pendidikan Pejabat Eselon Dinas Pendidikan Kota Batam	5
Tabel 1.4.	Jumlah Tenaga Pendidik Pada Setiap Satuan Pendidikan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	5
Tabel 1.5.	Jumlah Guru Menurut Jenjang dan Status Kepegawaian	6
Tabel 1.6.	Jumlah Penduduk Usia Sekolah pada Setiap Satuan Pendidikan	6
Tabel 1.7.	Jumlah Sekolah dan Kondisi Ruang Kelas	6
Tabel 2.1.	Indikator Kinerja Utama.....	9
Tabel 2.2.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan	10
Tabel 3.1.	Target dan Capaian Kinerja Dinas Pendidikan	21
Tabel 3.2.	Capaian Sasaran 1	23
Tabel 3.3.	Capaian Sasaran 2	25
Tabel 3.4.	Capaian Sasaran 3	34
Tabel 3.5.	Rincian Realisasi Anggaran Tahun 2020 dan 2021	36
Tabel 3.6.	Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2020-2021	37
Tabel 3.7.	Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2020 – 2021	38
Tabel 3.8.	Realisasi Belanja Modal Tahun 2020 – 2021	39



Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan tahun 2021 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya. Laporan ini diawali dengan perumusan perencanaan strategis, penetapan indikator kinerja, pengukuran serta ditindak lanjuti dengan penyusunan LKjIP.

1. Perencanaan Strategis (Renstra)

Perencanaan Strategis Dinas Pendidikan Kota Batam yang ditetapkan dalam tahun 2021-2026 ini menjadi acuan dalam merencanakan kegiatan setiap tahunnya. Unsur-unsur yang terkandung dalam renstra meliputi :

- Pernyataan tentang Visi dan Misi.
- Faktor-faktor penentu keberhasilan.
- Penetapan Tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran.

Perumusan Renstra ini merupakan jawaban atas perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat dan sulit diprediksi, sehingga kebutuhan akan renstra menjadi sangat penting.

Sesuai Rencana Kinerja Tahunan yang telah disusun untuk tahun 2021 terdapat 3 sasaran, 2 Program 8 Kegiatan dan 68 Sub Kegiatan yang harus dicapai/dilaksanakan, dengan dukungan APBD DPA SKPD tahun 2021 yang tersedia sebesar Rp. 749.062.577.167,-.

Dari evaluasi kinerja secara mandiri (self assesment), dari 3 sasaran yang telah ditetapkan seluruhnya dikategori berhasil mencapai target indikator kinerja 100%, namun masih ada beberapa sasaran yang masih diperlukan upaya perbaikan/penyempurnaan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran tersebut.



2. Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kota Batam

Sasaran yang hendak dicapai Dinas Pendidikan Kota Batam ditetapkan berdasarkan rumusan Renstra yang dijabarkan untuk mendukung dan mencapai Visi Misi Walikota Batam, sedangkan pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan pada kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 2021, sehingga pengukuran kinerja secara keseluruhan dapat dilakukan secara utuh.

Evaluasi Kinerja yang digunakan disajikan pada lampiran berdasarkan formulasi indikator kinerja yang telah dirumuskan. Pencapaian kinerja tersebut didukung oleh adanya faktor-faktor penunjang antara lain :

Pendanaan yang memadai, tenaga yang cukup, sarana dan prasarana serta dukungan lintas dinas dan partisipasi masyarakat yang semakin meningkat.

3. Rencana dan Realisasi Anggaran

Anggaran yang tersedia untuk Dinas Pendidikan Kota Batam tahun 2021 sebesar Rp. 749.062.577.1667 dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 700.837.518.544.22 atau (93.56 %). Adapun jumlah belanja operasi sebesar Rp. 591.866.197.355 dengan realisasi sebesar Rp. 558.431.871.800.5 (94.35 %) sedangkan untuk belanja modal sebesar Rp. 157.196.379.811.99 terealisasi sebesar Rp. 142.405.646.743.72 (90.59 %).



Bab 1 ***Pendahuluan***

A. Latar Belakang

Terselenggaranya Goodgovernance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sebagaimana dimaklumi untuk mencapai Program Pembangunan Daerah yang merupakan tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk didalamnya pengelolaan di bidang pendidikan, dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan taraf hidup masyarakat, sehingga berdampak terhadap capaian IPM di Kota Batam.

Keberadaan Dinas Pendidikan Kota Batam dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dalam rangka mewujudkan misi keempat Pemerintah Kota Batam, yakni Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat menguasai IPTEK dan bermuatan IMTAQ yang didukung dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat.

Menidaklanjuti tanggung jawab yang diberikan, maka Dinas Pendidikan Kota Batam telah menetapkan 3 (tiga) Sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Batam, yakni :

1. Meningkatnya aksesibilitas dan layanan pendidikan PAUD, SD, SMP dan kesetaran;
2. Meningkatnya mutu Manajemen Sekolah;
3. Optimalnya Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dalam mendukung urusan Perangkat Daerah.

Keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Batam disiasati dengan membebaskan sebagian pembangunan melalui APBN Bidang Pendidikan yang dialokasikan melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Batam berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 38 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai Tugas dan Fungsinya

2. Fungsi

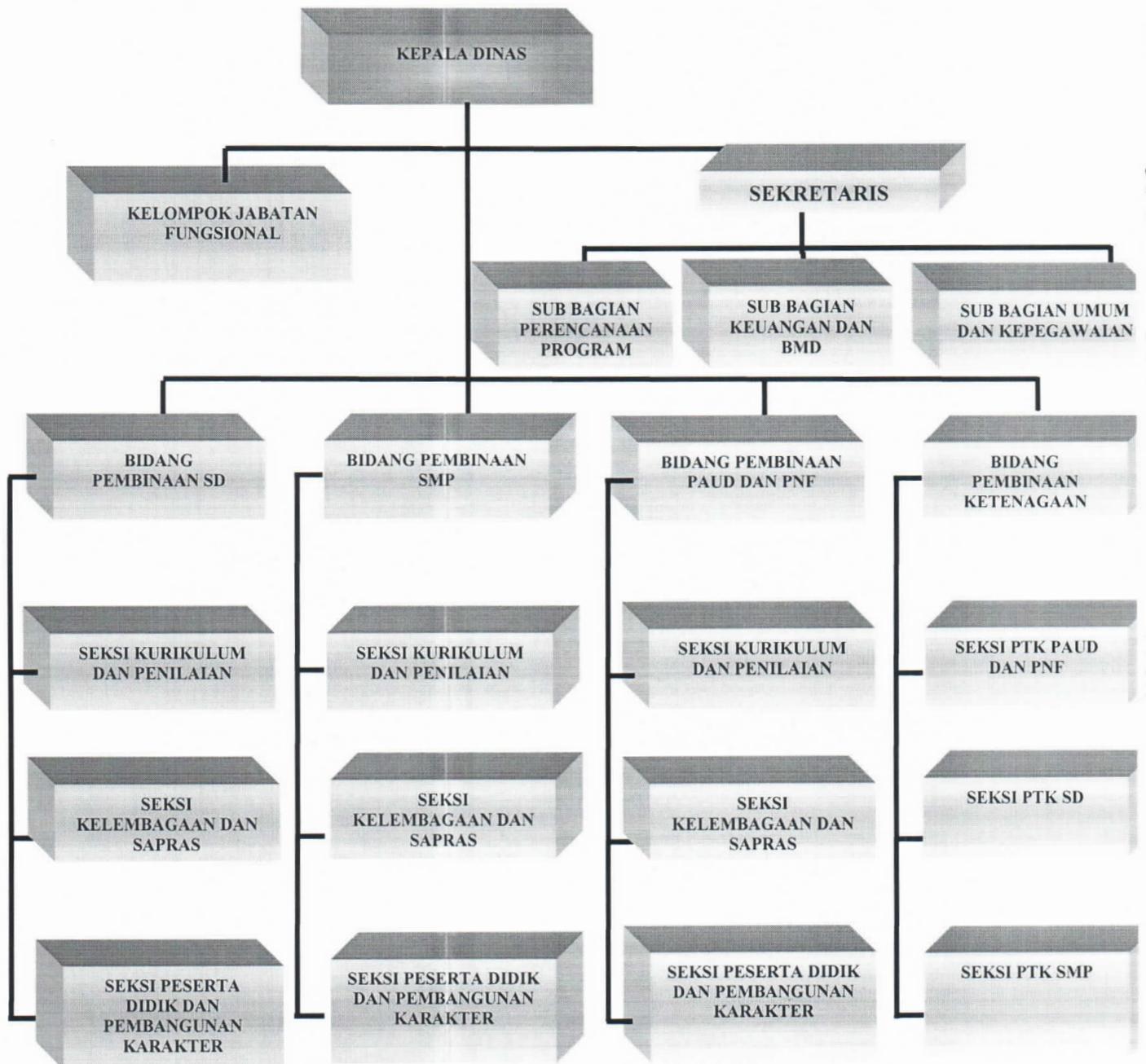
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi SKPD antara lain :

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Pembinaan Ketenagaan;
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Pembinaan Ketenagaan;
3. Pembinaan dan Pelaksanaan di Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Pembinaan Ketenagaan; dan
4. Pelaksanaan, Monitoring, Evaluasi dan Laporan Kegiatan Dinas.



C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Batam berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 38 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :



Dinas Pendidikan Kota Batam juga menaungi Satuan Pendidikan yang berada di Kota Batam. Persebaran Satuan Pendidikan di Kota Batam dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Sekolah di Kota Batam

No	Tingkatan Pendidikan	Jumlah Berdasarkan Status Sekolah	
		Negeri	Swasta
1.	Taman Kanak-Kanak/RA	19/0	373/126
2.	Sekolah Dasar/MI	145/2	222/33
3.	Sekolah Menengah Pertama/MTs	63/3	105/18

Sumber Data : Bidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Luar Biasa

Jumlah Pegawai di Dinas Pendidikan Kota Batam (tidak termasuk guru, pengawas, penilik dan pamong belajar) sampai dengan Bulan Desember 2021 sebanyak : 100 orang. Jumlah tersebut meliputi tenaga administrasi kependidikan yang tersebar pada: Sekretariat, Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, Bidang Pembinaan SD, Bidang Pembinaan SMP, Bidang Pembinaan Ketenagaan.

Tabel 1.2
Jumlah PNS Berdasarkan Golongan dan Non PNS

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	Golongan I	0
2	Golongan II	4
3	Golongan III	39
4	Golongan IV	16
5	Non PNS	41
TOTAL		100

Tabel 1.3**Tingkat Pendidikan Pejabat Eselon Dinas Pendidikan Kota Batam**

No	Uraian	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		SLTA	DIII	S1	S2	S3	
I	Struktural						
1	Eselon II	-	-	1	-	-	1
2	Eselon III	-	-	1	3	1	5
3	Eselon IV	-	-	8	8	-	16
Total I		0	0	10	11	1	22
II	Fungsional						
1	Pengawas Sekolah	-	-	14	8	-	22
2	Penilik	-	-	2	-	-	2
Total II		0	0	16	8	0	24
Total (I + II)		0	0	26	19	1	46

Tenaga pendidik yang merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Batam berjumlah 10.289 orang. Dilihat dari status kepegawaiannya sebanyak 78.08% dari jumlah tersebut merupakan tenaga pendidik (guru) non PNS. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4**Jumlah Tenaga Pendidik Pada Setiap Satuan Pendidikan Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Jenjang	Kualifikasi Pendidikan							Jumlah
		SMA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	
1	TK	16	16	12	48	700	7	0	799
2	SD	227	36	142	228	5698	176	0	6507
3	SMP	16	5	8	42	2837	75	0	2983
Total		259	57	162	318	9235	258	0	10289

Tabel 1.5**Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Menurut Jenjang dan Status Kepegawaian**

No	Jenjang	Pendidik Satuan Pendidikan Negeri		Pendidik Satuan Pendidikan Swasta	Jumlah
		PNS	Non PNS		
1	TK	31	52	716	799
2	SD	1380	1395	3732	6507
3	SMP	844	877	1262	2983
TOTAL		2255	2324	5710	10289

1. Keadaan Penduduk Usia Sekolah dan Siswa**Tabel 1.6****Jumlah Penduduk Usia Sekolah Pada Setiap Satuan Pendidikan**

Penduduk Usia Sekolah	Jumlah	Satuan Pendidikan	Peserta Didik
Usia 4-6 Tahun	66,328	TK/PAUD	60,027
Usia 7-12 Tahun	134,496	SD/MI	128,641
Usia 13-15 Tahun	57,246	SMP/MTS	51,836

2. Jumlah Sekolah dan Kondisi Ruang Kelas**Tabel 1.7****Jumlah Sekolah dan Kondisi Ruang Kelas**

Tingkat Pendidikan	Satuan Pendidikan Negeri	Ruang Kelas		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang/Berat
TK/PAUD	20	30	20	10
SD	144	1,642	969	673
SMP	63	866	529	337
TOTAL	227	2,538	1,518	1,020

Pembangunan pendidikan menuju Pendidikan Indonesia 2022 direncanakan tidak ada lagi penduduk yang tidak bersekolah di tingkat pendidikan dasar, dengan demikian akan terwujud derajat pendidikan masyarakat yang optimal, melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai dengan penduduknya hidup dalam lingkungan yang kondusif dan dengan perilaku yang rasional dalam kehidupan sosial, serta memiliki kemampuan berperilaku positif, adil dan merata serta memiliki derajat pendidikan sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia. Untuk mewujudkan pembangunan bidang pendidikan diperlukan perencanaan strategik agar arah pelaksanaan pembangunan akan lebih terarah dan fokus sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.

D. VISI DAN MISI

1. Pernyataan Visi Walikota Batam

Visi Walikota Batam yang diterjemahkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2021 – 2026 adalah :

“TERWUJUDNYA BATAM SEBAGAI BANDAR DUNIA MADANI YANG MODERN DAN SEJAHTERA”

2. Pernyataan Misi Walikota Batam

Ada pun misinya adalah :

1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah;
2. Mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang maju, ramah, aman, asri dan nyaman sesuai tata ruang;
3. Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berbudaya, produktif dan berakhlak mulia;
4. Melanjutkan percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam.



Bab 2 ***Perencanaan dan Perjanjian Kinerja***

A. PERENCANAAN

Dalam upaya mewujudkan Sasaran Strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Batam, maka perlu disusun suatu rencana kerja dan indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan strategi organisasi yang tepat. Indikator Kinerja Utama disusun dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan untuk selanjutnya dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengukur tingkat keberhasilan Dinas Pendidikan dalam menjalankan rencananya guna mencapai dan mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Salah satu permasalahan Pendidikan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Kota Batam adalah pemerataan dan perluasan kesempatan belajar, mutu dan relevansi, dan manajemen pendidikan khususnya pendidikan Dasar. Penekanan akan pentingnya pembangunan pendidikan, dibutuhkan karena semua pihak meyakini bahwa pembangunan di masa mendatang disamping tetap bertumpu pada pembangunan ekonomi, akan bertumpu pula pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dalam Pola dasar Pembangunan Kota Batam, ditegaskan bahwa titik berat pembangunan bidang pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah melainkan juga masyarakat atau stakeholder pendidikan.

Indikator Kinerja Utama

Dalam menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selanjutnya Dinas Pendidikan Kota Batam menetapkan suatu indikator kinerja utama yang menjadi pedoman dalam menentukan keberhasilan suatu SKPD :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Perluasan Akses Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD
2	Mutu Layanan Pendidikan	Persentasi Sekolah PAUD Berakreditasi Minimal B
		Persentasi SD Berakreditasi Minimal B
		Persentasi SMP Berakreditasi Minimal B
3	Penguatan Tata Kelola Layanan Pendidikan	Terlaksananya Tata Kelola Pelayanan Yang Efektif dan Efisien
4	Peningkatan Kualitas Masyarakat Melalui Bantuan Pendidikan	Tersedianya Bantuan Pendidikan yang Efektif Kepada Masyarakat

B. Rencana Strategis (RENSTRA)

Sesuai dengan dokumen RPJMD, maka tujuan yang ingin diwujudkan dalam pembangunan bidang pendidikan adalah **Mewujudkan pelayanan pendidikan yang unggul, merata, terbuka, terjangkau dan agamis dan bertaqwa.** Tujuan tersebut kemudian dijabarkan melalui Renstra Dinas Pendidikan Kota Batam sebagai berikut :



Tabel 2.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan

No	Tujuan dan Sasaran		Indikator Kinerja	Target					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	T1	Kualitas Pendidikan	Peringkat Hasil Ujian Sekolah SD Se Provinsi Kepulauan Riau						1
			Peringkat Hasil Ujian Sekolah SD Se Provinsi Kepulauan Riau						1
	S.1	Perluasan Akses Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	77.60	79.29	80.44	82.22	84.69	86.22
	S.2	Mutu Layanan Pendidikan	Persentase Sekolah Berakreditasi Minimal B						
			PAUD	36.46	41.35	45.00	48.00	53.00	60.00
			SD	53.58	56.00	61.00	64.00	67.00	70.00
			SMP	64.59	67.00	60.00	71.00	74.00	78.00
	S.3	Penguatan Tata Kelola Layanan Pendidikan	Terlaksananya Tata Kelola Pelayanan Yang Efektif dan Efisien	100	100	100	100	100	100
S.4	Peningkatan Kualitas Masyarakat Melalui Bantuan Pendidikan	Tersedianya Bantuan Pendidikan yang Efektif Kepada Masyarakat	100	100	100	100	100	100	

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan di capai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan di wujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan di wujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang di kelola nya. Manfaat dari perjanjian kinerja bagi pimpinan instansi adalah memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan kinerja instansi pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi.

Tahun 2021 terdapat 4 sasaran strategis yang di wujudkan dinas pendidikan kota batam. Keempat sasaran tersebut terdiri atas urusan wajib pendidikan. target yang tertuang dalam perjanjian tersebut akan di wujudkan melalui berbagai program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kota Batam tahun 2021.

Berikut adalah perjanjian kinerja Dinas Pendidikan Kota Batam :





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HENDRI ARULAN**

Jabatan : Kepala Dinas

Selanjutnya disebut pihak *pertama*.

Nama : **MUHAMMAD RUDI**

Jabatan : Walikota Batam

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak *kedua*.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
WALIKOTA BATAM

Batam, Januari 2021
Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BATAM

MUHAMMAD RUDI

HENDRI ARULAN
Pembina Tk. I
NIP. 19670719 199103 1 009

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Perluasan Akses Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	86,22
2	Mutu Layanan Pendidikan	Persentase Sekolah Berakreditasi Minimal B :	
		PAUD	60,00
		SD	70,00
		SMP	78,00
3	Penguatan Tata Kelola Pelayanan Pendidikan	Terlaksananya Tata Kelola Pelyanan yang Efektif dan Efisien	100
4	Peningkatan Kualitas Masyarakat Melalui Bantuan Pendidikan	Tersedianya bantuan pendidikan yang efektif kepada masyarakat	100

Program:

Anggaran:

Kegiatan:

- | | | | |
|--|----|-----------------|------------|
| 1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp | 355.936.957.661 | 4 Kegiatan |
| 2. Pengelolaan Pendidikan | Rp | 367.122.536.899 | 4 Kegiatan |



Pihak Kedua,
WALIKOTA BATAM

MUHAMMAD RUDI

Batam, Januari 2021
Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BATAM



HENDRI ARULAN
Pembina Tk. I
NIP. 19670719 199103



Bab 3 ***Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan***

Penetapan kinerja yang telah dituangkan dalam perjanjian kinerja disemua jenjang pada Dinas Pendidikan, telah ditetapkan target kinerja yang merupakan sebuah kewajiban yang harus dicapai oleh Dinas Pendidikan Khususnya pada tahun 2021. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian (keberhasilan/kegagalan) target kinerja dan sebagai bahan evaluasi kinerja diperlukan suatu informasi capaian target kinerja yang telah diperjanjikan tersebut. Dibawah ini diuraikan capaian kinerja atau atas sasaran/target kinerja seperti tercantum dalam penetapan kinerja tahun 2021. Akuntabilitas kinerja dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data dan analisisnya, pengklasifikasian, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintahan dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja, pertanggung jawaban dimaksudkan dalam rangka transparansi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sekaligus dijadikan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan perencanaan dengan pelaksanaan melalui kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi misi instansi pemerintahan.

Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pendidikan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian



Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Renja Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

Berdasarkan kontrak kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2020, Dinas Pendidikan Kota Batam berkewajiban untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholders* atas penggunaan anggaran negara. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian baik keberhasilan/kegagalan dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan analisis capaian kinerja. Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagai berikut:



No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri 54 Tahun 2010

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan disusun dan disajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang menggambarkan tingkat keberhasilan dan capaian kinerja yang telah ditetapkan.

A. CAPAIAN KINERJA DINAS PENDIDIKAN

Pelayanan dikatakan berkualitas atau memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat, apabila masyarakat tidak puas terhadap suatu pelayanan yang disediakan maka pelayanan tersebut dapat dipastikan tidak berkualitas atau efisien. Karena itu kualitas pelayanan sangat penting dan seharusnya selalu fokus pada kepuasan pelanggan. Bagi instansi pemerintahan khususnya Dinas Pendidikan sebagai instansi yang memberikan pelayanan pada layanan pendidikan harus memiliki ukuran keberhasilan menjalankan program dan kegiatan dalam bentuk Kinerja. Kinerja menunjukkan ukuran yang dijadikan dasar untuk mengukur dan menilai sejauh mana program dan kegiatan dapat terealisasi dalam periode kerja yang ditargetkan. Indikator kinerja program menyangkut hasil (*outcome*) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dijalankan sementara indikator kinerja kegiatan merupakan ukuran atas keluaran (*output*) dari suatu kegiatan yang terkait langsung dengan indikator program. Sasaran-sasaran yang hendak dicapai tentu dapat diukur dengan capaian tahun sebelumnya berdasarkan indikator kinerja yang ditentukan, target dan sasaran yang telah ditetapkan menjadi landasan bagi semua pelaksana program dan kegiatan untuk tetap fokus dan konsisten dalam komitmen yang dibangun untuk tercapainya kinerja yang

maksimal. Berdasarkan renstra dan renja Dinas Pendidikan telah ditetapkan Indikator kinerja Utama (IKU) antara lain:

1. APK PAUD;
2. Persentasi Sekolah PAUD Berakreditasi Minimal B;
3. Persentasi Sekolah SD Berakreditasi Minimal B;
4. Persentasi Sekolah SMP Berakreditasi Minimal B;
5. Terlaksananya Tata Kelola Pelayanan Yang Efektif dan Efisien;
6. Tersedianya Bantuan Pendidikan yang Efektif Kepada Masyarakat;

Capaian kinerja Dinas Pendidikan di tahun 2021 merupakan pelaksanaan program dan kegiatan ditahun 2021 dan telah dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian sasaran selama satu tahun. Berdasarkan Renstra dan Renja dinas pendidikan terdapat satu tujuan yang hendak dicapai. Dalam pencapaian tujuan telah ditetapkan 4 sasaran dengan rincian sasaran 1 memiliki 1 program, sasaran 2 memiliki 2 program dan sasaran 3 memiliki 2 program.

Dari hasil evaluasi dan analisis pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2021 capaian kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Target dan Capaian Kinerja Dinas Pendidikan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2021	
			Target	Realisasi
1	Perluasan Akses Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	86.22	86.25
2	Mutu Layanan Pendidikan	Persentasi Sekolah PAUD Berakreditasi Minimal B	60	62.61
		Persentasi SD Berakreditasi Minimal B	70	71.62
		Persentasi SMP Berakreditasi Minimal B	78	80.94
3	Penguatan Tata Kelola Layanan Pendidikan	Terlaksananya Tata Kelola Pelayanan Yang Efektif dan Efisien	100	100



4	Peningkatan Kualitas Masyarakat Melalui Bantuan Pendidikan	Tersedianya Bantuan Pendidikan yang Efektif Kepada Masyarakat	100	100
---	--	---	-----	-----

Dari tabel diatas Indikator Kinerja Utama (IKU) dikelompokkan untuk mengetahui berapa indikator yang termasuk dalam katagori sangat baik, baik, cukup dan katagori kurang.

- Terdapat 4 (empat) indikator dengan nilai $76 \leq 90$ dengan kategori **Tinggi**
- 2 (dua) indikator kinerja tercapai dengan nilai kinerja ≤ 50 dengan kategori **Sangat Rendah**.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan di tahun 2021 dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor **Kpts./419.1/DISDIK/I/2021** terdapat 6 Indikator Kinerja Utama sebagai sasaran kinerja Dinas Pendidikan. Penetapan indikator kinerja tersebut merupakan sasaran yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2021, yang telah ditetapkan target capaiannya sehingga dapat dibandingkan seberapa besar realisasi dari masing-masing indikator sasaran.

Untuk mengetahui tingkat ketercapaian (keberhasilan/ kegagalan) target kinerja dan sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan informasi capaian target yang telah ditetapkan. Di bawah ini diuraikan capaian kinerja atas sasaran/target kinerja seperti tercantum dalam penetapan kinerja tahun 2021 sebagai berikut :

Tujuan Renstra

Berdasarkan Dokumen Renstra Kota Batam Tahun 2016 – 2021 telah ditetapkan tujuan Renstra Dinas Pendidikan Kota Batam adalah : **"Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Pendidikan Kota Batam"**. Dengan Indikator Tujuan Indeks Pendidikan Kota Batam. Target Indikator Tujuan ditahun 2021 sebesar 73.75%, sedangkan realisasi capaian indikator Indeks Pendidikan



Kota Batam Tahun 2021 sebesar 73.72% Disini dapat dilihat bahwa Dinas Pendidikan Kota Batam belum mencapai target.

Sasaran 1

“Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintah Dalam Pelayanan Publik”

Sasaran 1 memiliki 1 Indikator Capaian yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan target pada Tahun 2021 sebesar 86.50 % dan capaian ditahun 2021 sebesar 88.25% dapat dilihat melebihi target. Sasaran 1 memiliki 1 Program yaitu Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini memiliki 4 Kegiatan dengan Jumlah Sub Kegiatan Sebanyak 11 Sub Kegiatan. Analisa capaian sasaran 1 dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2
Capaian Sasaran 1

No	Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintah Dalam Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	85.75	86,5	88.25
1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100%	100%	100%
1.1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%
1.1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
1.1.1.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bahan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
1.1.2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%

		Terpenuhi			
1.1.2. 1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
1.1.2. 2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
1.1.2. 3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
1.1.2. 4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
1.1.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%
1.1.3. 1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
1.1.3. 2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
1.1.4	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%
1.1.4. 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
1.1.4. 2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
1.1.4. 3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan

Persentase Indikator yang mencapai target tahun 2021 sebesar 100% yaitu dari 17 Indikator, terdapat 17 Indikator yang mencapai target.



Sasaran 2

“Meningkatnya aksesibilitas dan layanan pendidikan PAUD, SD, SMP dan kesetaran”

Sasaran 2 (dua) memiliki 4 (empat) Indikator Capaian yaitu :

1. Capaian Pemenuhan SPM PAUD terhadap target Nasional, dengan target pada Tahun 2021 sebesar 95.60 % dan capaian ditahun 2021 sebesar 95.61% Dapat dilihat melebihi target.
2. Capaian Pemenuhan SPM SD terhadap target Nasional, dengan target pada Tahun 2021 sebesar 99,67% dan capaian ditahun 2021 sebesar 99.65% Dapat dilihat mencapai target.
3. Capaian Pemenuhan SPM SMP terhadap target Nasional, dengan target pada Tahun 2021 sebesar 99,17% dan capaian ditahun 2021 sebesar 99.35% Dapat dilihat mencapai target.
4. Capaian Pemenuhan SPM Pendidikan Kesetaraan terhadap target Nasional, dengan target pada Tahun 2021 sebesar 94,65% dan capaian ditahun 2021 sebesar 94.78% Dapat dilihat mencapai target.

Sasaran 2 (dua) memiliki 2 (dua) Program yaitu :

1. Program Pengelolaan Pendidikan.

Program ini memiliki 4 Kegiatan dengan Jumlah Sub Kegiatan Sebanyak 57 Sub Kegiatan. Analisa capaian sasaran 1 dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 3.3
Capaian Sasaran 2

No	Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021
1	Meningkatnya aksesibilitas dan layanan pendidikan PAUD, SD, SMP dan kesetaran	1. Capaian Pemenuhan SPM PAUD terhadap target Nasional 2. Capaian Pemenuhan SPM SD terhadap target Nasional 3. Capaian Pemenuhan SPM SMP terhadap target Nasional 4. Capaian Pemenuhan	95.60 99.67 99.17 94.65	95.63 99.70 99.30 94.75	95.61 99.65 99.35 94.78

		SPM Kesetaraan terhadap target Nasional			
1.1	Program Pengelolaan Pendidikan	1. Persentase anak usia 5-6 tahun yang melaksanakan pendidikan PAUD 2. Persentase anak berusia 7-12 tahun yang melaksanakan pendidikan di Sekolah Dasar/ sederajat 3. Persentase anak berusia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama/ sederajat 4. Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal dan yang sedang melaksanakan pendidikan kesetaraan	79.32 95.65 90.55 91.25	79.50 96.00 91.00 91.45	79.65 96.08 91.20 91.57
1.1.1	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rata-rata Capaian Nilai Mutu Pendidikan jenjang SD	6.55	6.6	6.6
1.1.1.1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Unit Sekolah baru (USB) SD yang dibangun	0 Unit	0 Unit	0 Unit
1.1.1.2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas baru SD yang dibangun	5 Ruang	16 Ruang	16 Ruang
1.1.1.3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah SD yang difasilitasi Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah
1.1.1.4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah SD yang difasilitasi Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolahnya	9 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah
1.1.1.5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah SD yang difasilitasi Pembangunan Perpustakaan Sekolahnya	1 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah
1.1.1.6	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah SD yang difasilitasi Pembangunan Laboratoriumnya	0 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah
1.1.1.7	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sekolah yang difasilitasi Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas SD	10 Sekolah	12 Sekolah	12 Sekolah
1.1.1.8	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	Jumlah SD yang difasilitasi Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	1 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah
1.1.1.9	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang / Berat	3 Sekolah	16 Sekolah	41 Sekolah
1.1.1.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah SD yang difasilitasi Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0 Sekolah	8 Sekolah	8 Sekolah



1.1.1.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah SD yang difasilitasi Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratoriumnya	0 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah
1.1.1.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah SD yang difasilitasi Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolahnya	7 Sekolah	3 Sekolah	3 Sekolah
1.1.1.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah SD yang difasilitasi Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolahnya	24 Sekolah	8 Sekolah	7 Sekolah
1.1.1.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah SD yang difasilitasi Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolahnya	4 Sekolah	5 Sekolah	10 Sekolah
1.1.1.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah SD yang difasilitasi Rehabilitasi Sedang/Berat Unit Kesehatan Sekolahnya	0 Sekolah	1 Sekolah	1 Sekolah
1.1.1.16	Pengadaan Mebeluer Sekolah	Jumlah SD yang difasilitasi Pengadaan Mebeluer Sekolahnya	0 Sekolah	2 Sekolah	1 Sekolah
1.1.1.17	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah SD yang difasilitasi pemeliharaan mebel sekolahnya	0 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah
1.1.1.18	Pengadadan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah SD yang difasilitasi pengadaan Alat Rumah Tangganya	0 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah
1.1.1.19	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Sekolah yang difasilitasi pengadaan Perlengkapan Sekolahnya	0 Sekolah	4 Sekolah	4 Sekolah
1.1.1.20	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah siswa yang difasilitasi pengadaan Perlengkapan sekolahnya	0 Orang	0 Orang	0 Orang
1.1.1.21	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Jumlah Sekolah yang difasilitasi pemeliharaan Bangunan Gedung dan Ruangan SD	0 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah
1.1.1.22	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah SD yang difasilitasi Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Utilitasnya	0 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah
1.1.1.23	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah SD yang difasilitasi Pemeliharaan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolahnya	0 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah
1.1.1.24	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik SD yang difasilitasi Biaya Personilnya	432 Orang	832 Orang	1204 Orang
1.1.1.25	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Sekolah yang difasilitasi Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	4 Sekolah	7 Sekolah	3 Sekolah

		SD			
1.1.1.26	Penyiapan dan Tindak lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah sekolah yang difasilitasi Penyiapan dan Tindak lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	0 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah
1.1.1.27	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik SD yang mengikuti Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	0 Orang	0 Orang	0 Orang
1.1.1.28	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa SD yang mengikuti Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	200 Orang	200 Orang	200 Orang
1.1.1.29	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	3282 Orang	3282 Orang	3283 Orang
1.1.1.30	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan SD	1500 Orang	0 Orang	0 Orang
1.1.1.31	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Lembaga yang difasilitasi Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga
1.1.1.32	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Negeri SD yang mengelola Dana BOS	144 Sekolah	144 Sekolah	144 Sekolah
1.1.2	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Nilai Rata-rata Capaian Nilai Mutu Pendidikan jenjang SMP	6.5	6.55	6.55
1.1.2.1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Unit Sekolah Baru (USB) SMP yang dibangun	0 Unit	4 Unit	4 Unit
1.1.2.2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru SMP yang dibangun	4 Ruang	2 Ruang	2 Ruang
1.1.2.3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah SMP yang difasilitasi Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah
1.1.2.4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah SMP yang difasilitasi Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolahnya	0 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah
1.1.2.5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah SMP yang difasilitasi Pembangunan Perpustakaan Sekolahnya	3 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah
1.1.2.6	Pembangunan Laboratorium Sekolah Menengah Pertama	Jumlah SMP yang difasilitasi Pembangunan Laboratoriumnya	3 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah

1.1.2.7	Pembangunan Ruang Serbaguna/AULA	Jumlah SMP yang difasilitasi Pembangunan Ruang Serbaguna/AULAny	0 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah
1.1.2.8	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang dibangun	0 Unit	1 Unit	1 Unit
1.1.2.9	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah SMP yang difasilitasi Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah
1.1.2.10	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah SMP yang difasilitasi Pembangunan Fasilitas Parkirnya	0 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah
1.1.2.11	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah SMP yang difasilitasi Pembangunan Kantin Sekolahnya	0 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah
1.1.2.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah SMP yang difasilitasi Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5 Sekolah	8 Sekolah	12 Sekolah
1.1.2.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah SMP yang difasilitasi Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolahnya	0 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah
1.1.2.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah SMP yang difasilitasi Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolahnya	3 Sekolah	13 Sekolah	13 Sekolah
1.1.2.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru	Jumlah SMP yang difasilitasi Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolahnya	2 Sekolah	2 Sekolah	2 Sekolah
1.1.2.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah SMP yang difasilitasi Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolahnya	0 Sekolah	1 Sekolah	1 Sekolah
1.1.2.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah SMP yang difasilitasi Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolahnya	3 Sekolah	3 Sekolah	2 Sekolah
1.1.2.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah SMP yang difasilitasi Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolahnya	4 Sekolah	9 Sekolah	5 Sekolah
1.1.2.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serbaguna/AULA	Jumlah SMP yang difasilitasi Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serbaguna/AULAny	0 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah
1.1.2.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama	Jumlah Asrama Sekolah yang di Rehabilitasi Sedang/Berat	0 Unit	0 Unit	0 Unit
1.1.2.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah SMP yang difasilitasi Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolahnya	1 Sekolah	2 Sekolah	1 Sekolah

		Sekolah/Guru/Penjaga Sekolahnya			
1.1.2.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Jumlah SMP yang difasilitasi Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkirnya	0 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah
1.1.2.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Jumlah SMP yang difasilitasi Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolahnya	0 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah
1.1.2.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah SMP yang difasilitasi Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolahnya	7 Sekolah	4 Sekolah	7 Sekolah
1.1.2.17	Pengadaan Mebeleur Sekolah	Jumlah SMP yang difasilitasi Pengadaan Mebeleur Sekolahnya	0 Sekolah	1 Sekolah	1 Sekolah
1.1.2.18	Pengadadan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah SMP yang difasilitasi Pengadadan Alat Rumah Tangga Sekolahnya	0 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah
1.1.2.17	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah SMP yang difasilitasi Pengadaan Perlengkapan Sekolahnya	0 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah
1.1.2.18	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah siswa yang difasilitasi pengadaan Perlengkapan sekolahnya	0 Orang	0 Orang	0 Orang
1.1.2.17	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Jumlah SMP yang difasilitasi Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangannya	0 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah
1.1.2.18	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah SMP yang difasilitasi Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolahnya	0 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah
1.1.2.17	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah SMP yang difasilitasi Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolahnya	4 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah
1.1.2.18	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah peserta didik yang difasilitasi penyediaan Personil Peserta didik	389 Orang	389 Orang	734 Orang
1.1.2.17	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Jumlah SMP yang difasilitasi Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	2 Sekolah	3 Sekolah	63 Sekolah
1.1.2.18	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah siswa yang difasilitasi Perlengkapan Belajarnya	0 Orang	0 Orang	0 Orang
1.1.2.17	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah SMP yang difasilitasi Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	7 Sekolah	12 Sekolah	9 Sekolah



1.1.2.18	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik SMP yang mengikuti Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	0 Orang	0 Orang	0 Orang
1.1.2.17	Penyiapan dan Tindak lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah SMP yang difasilitasi Penyiapan dan Tindak lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	0 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah
1.1.2.18	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa SMP yang difasilitasi Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	450 Orang	450 Orang	450 Orang
1.1.2.17	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang difasilitasi Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.287 Orang	1.287 Orang	1.270 Orang
1.1.2.18	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang difasilitasi Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	662 Orang	195 Orang	412 Orang
1.1.2.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Lembaga yang difasilitasi Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	0 Lembaga	3 Lembaga	3 Lembaga
1.1.2.18	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Negeri SMP yang mengelola Dana BOS	63 Sekolah	63 Sekolah	64 Sekolah
1.1.2.17	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah SMP yang difasilitasi Pemeliharaan Mebel Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah
1.1.2.18	Rehabilitasi Sedang /Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah SMP yang difasilitasi Rehabilitasi Sedang /Berat Ruang Kepala Sekolah	0 Sekolah	2 Sekolah	2 Sekolah
1.1.2.17	Rehabilitasi Sedang /Berat Ruang TU	Jumlah SMP yang difasilitasi Rehabilitasi Sedang /Berat Ruang TU	0 Sekolah	1 Sekolah	1 Sekolah
1.1.3	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Rata-rata Capaian Nilai Mutu Pendidikan jenjang PAUD	75.2	75.4	75.4
1.1.3.1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang dibangun	1 Unit	1 Unit	1 Unit
1.1.3.2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah PAUD yang difasilitasi Pembangunan	2 Sekolah	4 Sekolah	10 Sekolah

		Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			
1.1.3.3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah PAUD yang difasilitasi Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1 Sekolah	6 Sekolah	6 Sekolah
1.1.3.4	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah PAUD yang difasilitasi Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	3 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah
1.1.3.5	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah PAUD yang difasilitasi Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	0 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah
1.1.3.6	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah siswa yang difasilitasi Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	0 Orang	0 Orang	0 Orang
1.1.3.7	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah PAUD yang difasilitasi Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	0 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah
1.1.3.8	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah PAUD yang difasilitasi Pengadaan Mebel PAUD	0 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah
1.1.3.9	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Jumlah PAUD yang difasilitasi Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	0 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah
1.1.3.10	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah PAUD yang difasilitasi Pengadaan Perlengkapan PAUD	0 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah
1.1.3.11	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah siswa yang difasilitasi pengadaan Perlengkapan sekolahnya	0 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah
1.1.3.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah PAUD yang difasilitasi Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	1 Sekolah	6 Sekolah	2 Sekolah
1.1.3.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Siswa yang difasilitasi Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	0 Orang	7000 Orang	7150 Orang
1.1.3.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang difasilitasi Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	0 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah
1.1.3.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang difasilitasi Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1.444 Orang	1.444 Orang	1.444 Orang



1.1.3.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang difasilitasi Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	300 Orang	500 Orang	450 Orang
1.1.3.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Lembaga yang difasilitasi Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	0 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga
1.1.3.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Satuan Pendidikan PAUD yang mengelola Dana BOP	305 Sekolah	305 Sekolah	20 Sekolah
1.1.3.19	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah PAUD yang difasilitasi Pemeliharaan Mebel Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah
1.1.4	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Persentase Rata-rata Capaian Nilai Mutu Pendidikan Kesetaraan	60	60.2	60.2
1.1.4.1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal / Kesetaraan yang dibangun	0 Ruang	0 Ruang	0 Ruang
1.1.4.2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal / Kesetaraan yang difasilitasi Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal / Kesetaraan	1 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah
1.1.4.3	Rehabilitasi Sedang /Berat Gedung Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal / Kesetaraan yang difasilitasi Rehabilitasi Sedang /Berat Gedung Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0 Sekolah	1 Sekolah	1 Sekolah
1.1.4.4	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal / Kesetaraan yang difasilitasi Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	0 Sekolah	1 Sekolah	1 Sekolah
1.1.4.5	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal / Kesetaraan yang difasilitasi Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah
1.1.4.6	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal / Kesetaraan yang difasilitasi Pemeliharaan Rutin	0 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah



		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan			
1.1.4.7	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal / Kesetaraan yang difasilitasi Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Sekolah	1 Sekolah	1 Sekolah
1.1.4.8	Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal / Kesetaraan yang difasilitasi Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah
1.1.4.9	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal / Kesetaraan yang difasilitasi Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah
1.1.4.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Siswa yang difasilitasi Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	0 Orang	0 Orang	0 Orang
1.1.4.11	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Siswa yang difasilitasi Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	0 Orang	0 Orang	0 Orang
1.1.4.12	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal / Kesetaraan yang difasilitasi Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah
1.1.4.13	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang difasilitasi Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	17 Orang	17 Orang	17 Orang
1.1.4.14	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal / Kesetaraan yang difasilitasi Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	1 Sekolah	1 Sekolah	1 Sekolah
1.1.4.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang difasilitasi Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga	0 Orang	0 Orang	0 Orang



		Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
1.1.4.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga yang difasilitasi Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	0 Lembaga	0 Lembaga	0 Lembaga
1.1.4.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mengelola Dana BOP	24 Sekolah	24 Sekolah	1 Sekolah
1.1.4.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Sekolah Nonformal / Kesetaraan yang difasilitasi Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	0 Sekolah	1 Sekolah	1 Sekolah
1.1.4.19	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Sekolah Nonformal / Kesetaraan yang difasilitasi Pembangunan Laboratorium	0 Sekolah	1 Sekolah	1 Sekolah
1.1.4.20	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal / Kesetaraan yang difasilitasi Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0 Sekolah	0 Sekolah	0 Sekolah

2. Program Pengembangan Kurikulum

Tabel 3.3
Capaian Sasaran 3

No	Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021
2	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Sekolah yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal	70%	70%	0%
2.1	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1. Persentase SD yang memiliki kurikulum muatan lokal sesuai dengan ketentuan 2. Persentase SMP yang memiliki kurikulum muatan lokal sesuai dengan ketentuan	70% SD 70% SMP	0% SD 70% SMP	0% SD 70% SMP
2.1.1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1. Jumlah SD yg difasilitasi Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal 2. Jumlah SMP yg difasilitasi Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal	259 SD 140 SMP	259 SD 140 SMP	259 SD 140 SMP

2.1.2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1. Jumlah SD yg difasilitasi Penyusunan Silabus Muatan Lokal 2. Jumlah SMP yg difasilitasi Penyusunan Silabus Muatan Lokal	259 SD 140 SMP	259 SD 140 SMP	259 SD 140 SMP
2.1.3	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1. Jumlah SD yg difasilitasi Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal 2. Jumlah SMP yg difasilitasi Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal	259 SD 140 SMP	259 SD 140 SMP	259 SD 140 SMP
2.1.4	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1. Jumlah SD yg difasilitasi Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 2. Jumlah SMP yg difasilitasi Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	259 SD 140 SMP	259 SD 140 SMP	259 SD 140 SMP
2.2	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase Sekolah PAUD dan Kesetaraan yang memiliki kurikulum muatan lokal sesuai dengan ketentuan	70%	70%	70%
2.2.1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Sekolah PAUD dan Kesetaraan yang difasilitasi Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal	420 Sekolah	420 Sekolah	420 Sekolah
2.2.2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Sekolah PAUD dan Kesetaraan yang difasilitasi Penyusunan Silabus Muatan Lokal	420 Sekolah	420 Sekolah	420 Sekolah
2.2.3	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Sekolah PAUD dan Kesetaraan yang difasilitasi Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal	420 Sekolah	420 Sekolah	420 Sekolah

C. REALISASI ANGGARAN

Kinerja Dinas Pendidikan Kota Batam didukung oleh Penganggaran yang bersumber dari APBD Kota Batam Tahun 2021. Pengukuran atas pencapaian target dalam kegiatan yang tertuang pada masing-masing indikator kegiatan secara rinci dapat dilihat pada data tabel berikut. Persentase realisasi fisik pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Batam sampai dengan



akhir tahun anggaran adalah 100%. Adapun kegiatan-kegiatan yang berhasil mencapai target 100% adalah sebagai berikut :

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
5. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar;
6. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
7. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
8. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

Perkembangan keadaan fisik dan keuangan kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan juga dipengaruhi oleh proses dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, prosedur pelelangan yang harus dipenuhi, biaya revisi anggaran kondisi alam terutama pada paket pekerjaan konstruksi.

D. AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN

Akuntabilitas Kinerja Keuangan dipengaruhi oleh jumlah anggaran yang dialokasikan dalam APBD Kota Batam untuk Bidang Pendidikan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Batam. Persentase realisasi keuangan untuk seluruh kegiatan OPD di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Batam mencapai 93.56%. Yang teralokasi tersebut dimanfaatkan oleh Dinas Pendidikan Kota Batam untuk biaya operasional seluruh kegiatan yang telah dianggarkan pada Tahun Anggaran 2021.

Biaya operasional kegiatan tersebut terdiri dari belanja pegawai dalam bentuk honorarium, belanja barang jasa serta belanja modal. Pagu anggaran yang dialokasikan ditetapkan pada Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp. 749.062.577.167,- terealisasi sebesar Rp. 700.872.563.386.22,-

Selain itu untuk melaksanakan pembangunan bidang pendidikan, Pemerintah juga melakukan penambahan alokasi anggaran melalui Biaya Operasional Sekolah (BOS). Dengan demikian pembangunan bidang pendidikan diharapkan tetap terselenggara sesuai perencanaan yang telah tertuang dalam Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Batam.

Berikut disajikan tabel rincian realisasi anggaran tahun 2020.

Tabel 3.5
Rincian Realisasi Anggaran Tahun 2020 dan 2021

NO	URAIAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021	
		Rp.	%	Rp.	%
1	Target Keuangan	615.992.049.058,86	93.63	749.062.577.167	93.56
2	Realisasi Keuangan	576.759.769.075,44		700.837.518.544.22	

Sumber: Laporan keuangan Dinas Pendidikan

1. Belanja Pegawai

Anggaran Belanja Pegawai untuk Tahun 2021 sebesar Rp. 334.109.050.031,- (Perda Perubahan APBD) dan terealisasi sebesar Rp. 325.332.292.937,- atau 97.37% sehingga Belanja Pegawai yang tidak terealisasi sebesar Rp. 8.776.757.094 atau 6.44%. Jika dibandingkan Belanja Pegawai tahun 2020 sebesar Rp. 299.971.645.966,- maka terjadi kenaikan Belanja Pegawai sebesar Rp. 34.137.404.065,-.

Jumlah anggaran dan realisasi belanja Pegawai tahun 2020 dan 2021 di Dinas Pendidikan Kota Batam disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.6
Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2020-2021

Kode Rekening	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2021
5.1.01.	Belanja Pegawai	299,971,645,966.00	325,332,292,937.00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	152,135,892,657.00	160,806,742,788.00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	112,874,676,285.00	118,662,782,820.00
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	11,332,612,465.00	11,858,534,240.00
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	225,745,000.00	221,830,000.00
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	8,720,165,000.00	8,976,107,000.00

5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1,470,585,000.00	1,620,803,000.00
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	6,019,188,300.00	7,336,111,620.00
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	391,994,806.00	329,739,812.00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1,699,840.00	1,799,963.00
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	10,172,544,493.00	10,824,736,245.00
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	926,681,468.00	243,374,547.00
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN		730,923,541.00
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	147,835,753,309.00	89,797,002,169.00
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		74,728,547,980.00

Sumber : Laporan Keuangan Dinas Pendidikan

2. Belanja Barang Jasa

Anggaran Belanja Barang Jasa untuk Tahun 2021 sebesar Rp. 242.653.215.529,- (Perda Perubahan APBD). Jika dibandingkan Belanja Barang Jasa tahun 2020 sebesar Rp. 222.917.186.633,62 maka pada Tahun 2021 terjadi Kenaikan Belanja Barang Jasa sebesar Rp. 19.736.028.895.38.

Tabel 3.7
Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2020 - 2021

Kode Rekening	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2021
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	197,269,030,167.62	222,560,597,068.50
5.1.02.01.	Belanja Barang	17,278,408,945.88	6,071,709,413.63
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	17,278,408,945.88	6,071,709,413.63
5.1.02.02.	Belanja Jasa	114,522,361,387.12	127,675,357,050.00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	69,772,811,765.12	121,588,775,600.00
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	42,044,950,372.00	4,044,416,450.00
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2,202,661,250.00	1,326,841,000.00
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	501,938,000.00	715,324,000.00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	11,258,234,710.00	426,168,899.87



5.1.02.03.01.	Belanja Pemeliharaan Tanah	1,867,996,805.00	148,495,899.87
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,796,504,799.00	255,273,000.00
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7,593,733,106.00	22,400,000.00
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	246,252,445.00	347,695,457.00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	246,252,445.00	347,695,457.00
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2,802,507,000.00	493,200,000.00
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2,802,507,000.00	493,200,000.00
5.1.02.88.	Belanja Barang dan Jasa BOS	51,161,265,679.62	87,546,466,248.00
5.1.02.88.88.	Belanja Barang dan Jasa BOS	51,161,265,679.62	87,546,466,248.00
5.1.05.	Belanja Hibah	1,363,105,960.00	10,538,981,795.00
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1,363,105,960.00	10,538,981,795.00
5.1.05.05.01.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan		1,250,000,000.00
5.1.05.05.02.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar		9,288,981,795.00

3. Belanja Modal

Belanja modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 tahun. Berdasarkan laporan keuangan, anggaran belanja modal tahun 2021 sebesar Rp. 157.196.379.811.99,- Jika dibandingkan dengan Belanja modal tahun 2020 sebesar Rp. 81.168.115.960.49,- maka terjadi kenaikan belanja modal sebesar Rp. 76.028.263.851.50.

Tabel 3.8
Realisasi Belanja Modal Tahun 2020 - 2021

Kode Rekening	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2021
5.2.	BELANJA MODAL	78,152,986,981.82	142,405,646,743.72
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25,528,407,642.25	45,206,860,031.00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36,380,663,472.57	62,002,839,119.63
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	720,240,828.00	10,741,447,203.09
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15,523,675,039.00	24,454,500,390.00

Sumber : Laporan Keuangan Dinas Pendidikan tahun 2021

Bab 4 Penutup

Tujuan utama penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kota Batam adalah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan program dan anggaran tahun 2021. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP ini diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat penilai kualitas kinerja, alat evaluasi kinerja, serta sebagai alat pendorong demi terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa.

Kegiatan-kegiatan di Dinas Pendidikan Kota Batam sebagai sasaran kinerja yang direncanakan secara umum dapat dilaksanakan dengan lancar dan baik. Namun untuk kegiatan-kegiatan tertentu terjadi perubahan kebijakan disesuaikan dengan kondisi pada saat pandemi Covid-19 dan perubahan kebijakan terhadap pelaksanaan ujian sekolah dan ujian nasional oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Capaian kinerja secara fisik dapat direalisasikan 100 %.

Dari uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. Tinjauan Umum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kota Batam disusun sebagai upaya untuk mendukung Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibidang Pendidikan untuk menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang semakin handal, profesional, efektif dan efisien serta tanggap terhadap perkembangan di lingkungan masyarakat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Tujuan penyusunan LKjIP ini adalah sebagai alat ukur dan evaluasi manajemen yang dapat digunakan untuk peningkatan kualitas, pengambilan keputusan dan



pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di jajaran Dinas Pendidikan Kota Batam.

B. Tinjauan Khusus

LKjIP ini telah menyajikan sebagian dari perencanaan strategis yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 dengan berbagai kendala dan hambatan serta upaya-upaya pemecahan masalah yang ditempuh.

Pencapaian kinerja suatu instansi di lingkungan pemerintahan dapat dikatakan berhasil atau gagal dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) masing-masing OPD. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kota Batam berdasarkan Renstra Dinas Pendidikan Kota Batam tahun 2021-2026 terdiri dari 3 Sasaran dan 9 Indikator Kinerja Utama (IKU).

C. Saran dan Tindak Lanjut

LKjIP di susun sebagai bahan laporan di tahun 2021 dan evaluasi Dinas Pendidikan dalam melaksanakan kegiatan di tahun 2022. Sebagai saran dilakukan evaluasi terhadap sasaran dan target kinerja menyesuaikan keadaan dan situasi pandemi Covid-19. Dan penyesuaian mengacu pada (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) SIPD.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun Anggaran 2021, mudah-mudahan dapat memenuhi harapan semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Amin

Batam, Januari 2022
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Batam



HENDRI ARULAN
Pembina Tk. I
NIP. 19670719 199103 1 009

